

**PENGUATAN PRINSIP *EQUALITY OF OPPORTUNITY* DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN PASCA PENGHAPUSAN *PRESIDENTIAL*
THRESHOLD
(STUDI PUTUSAN MK NOMOR 62/PUU-XXII/2024)**

SKRIPSI

Oleh

Aditya Putra Ainur Rendra

NIM. 05010422001



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aditya Putra Ainur Rendra
Nim : 05010422001
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Penguatan Prinsip *Equality Of Opportunity* Dalam Sistem
Ketatanegaraan Pasca Penghapusan *Presidential Threshold*
(Studi Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 12 Mei 2026

Yang M.



Aditya Putra Ainur Rendra
NIM. 05010422001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aditya Putra Ainur Rendra

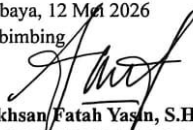
NIM. : 05010422001

Judul : Penguatan Prinsip *Equality Of Opportunity* Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Penghapusan *Presidential Threshold* (Studi Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024)

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan ke pada sidang munaqasah skripsi

Surabaya, 12 Mei 2026

Pembimbing



H. Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.

NIP. 198905172015031006

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aditya Putra Ainur Rendra

NIM. : 05010422001

Judul : Penguatan Prinsip *Equality of Opportunity* Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Penghapusan *Presidential Threshold* (Studi Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



H. Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.

NIP. 198905172015031006₂

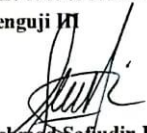
Penguji II



Dr. Achmad Yasin, M.Ag.

NIP. 196707271996031002

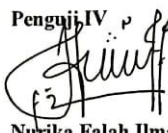
Penguji III



Achmad Safudin R., M.H.

NIP. 199212292019031005

Penguji IV



Nurika Falah Ilmania, S.H., M.H.

NIP. 200005032025052009

Surabaya, 19 Juni 2026

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Sugiyah Musafahah, M.Ag.

NIP. 196308271999032001

LEMBAR PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aditya Putra Ainur Rendra
NIM : 05010422001
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : ainurrendra19@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Penguatan Prinsip *Equality Of Opportunity* Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Penghapusan

Presidential Threshold (Studi Putusan MK NOMOR 62/PUU-XXII/2024)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juli 2026

Penulis

(Aditya Putra Ainur Rendra)

ABSTRAK

Penghapusan *presidential threshold* melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang dinilai sebagai langkah korektif terhadap pembatasan hak politik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Ketentuan yang sebelumnya dianggap menimbulkan ketidakadilan serta membatasi prinsip *equality of opportunity* dalam sistem demokrasi Indonesia. Berdasarkan hal tersebut penulis memfokuskan pada 2 rumusan masalah yakni bagaimana penguatan prinsip *equality of opportunity* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca penghapusan *presidential threshold* berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 dan bagaimana prinsip *al-'adl* (keadilan) dalam *fiqh siyāsah* memandang penghapusan *presidential threshold* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PUU-XXII/2024. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Penelitian ini memfokuskan analisis pada penguatan prinsip *equality of opportunity* pasca penghapusan *presidential threshold* dan dalam perspektif *fiqh siyāsah* memfokuskan analisis pada prinsip *al-'adl* (keadilan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/ Prinsip *al-'adl* dipilih sebagai pisau analisis utama dalam meneliti problematika *presidential threshold* karena isu fundamental dalam kebijakan ini adalah pemenuhan hak politik dan kesetaraan peluang (*equality of opportunity*) bagi setiap peserta pemilu. Berdasarkan kajian konseptual, *al-'adl* dan *al-qisth* sama-sama bermakna keadilan, namun memiliki penekanan yang berbeda. Syaiful Muhyidin dan Abd. Rozaq menjelaskan bahwa *al-'adl* bermakna "sama rata" (*al-musawah*) dan berlaku secara menyeluruh, sedangkan *al-qisth* bermakna "lurus" (*al-istiqamah*) yang menekankan pada keadilan yang proporsional dan terukur. Dalam konteks *presidential threshold*, masalah utamanya bukan pada proporsionalitas pembagian kekuasaan, melainkan pada kesetaraan akses dan perlakuan yang sama di mata hukum bagi seluruh partai politik. Oleh karena itu, *al-'adl* lebih tepat digunakan untuk mengevaluasi apakah kebijakan ini telah memperlakukan semua pihak secara setara tanpa diskriminasi.

Disarankan agar pembentuk undang-undang segera merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 beserta peraturan turunannya untuk mengatur mekanisme pencalonan presiden secara lebih teknis. Selain itu, perlu dibentuk ketentuan yang mendorong koalisi berbasis program dan kebijakan, serta meningkatkan kesiapan teknis penyelenggaraan pemilu dalam menghadapi bertambahnya pasangan calon. Pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI/Polri, dan penyelenggara pemilu juga perlu diperkuat guna menjamin terlaksananya prinsip keadilan, kesetaraan, dan demokrasi yang berkualitas.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBINING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Landasan Teori	11
H. Definisi Operasional.....	19
I. Metode Penelitian.....	20
BAB II TEORI PENGUATAN PRINSIP <i>EQUALITY OF OPPORTUNITY</i> /SISTEM PRESIDENSIAL DAN <i>FIQH SIYĀSAH</i>	25
A. <i>Equality of Opportunity</i>	25
1. Pengertian <i>equality of opportunity</i>	25
2. Konsep dasar kesetaraan kesempatan dalam teori keadilan.....	27
B. Sistem Presidensial	30
1. Pengertian sistem presidensial	30
2. Karakter sistem presidensial	32
3. <i>Presidential threshold</i> dalam sistem presidensial Indonesia.....	34
C. <i>Fiqh Siyāsah</i>	35
1. Pengertian <i>fiqh siyāsah</i>	35
2. Ruang lingkup <i>fiqh siyāsah</i>	36
3. <i>Siyāsah dustūrīyah</i>	39

4. Prinsip keadilan (<i>Al-‘Adl</i>)	40
5. Prinsip Keadilan (<i>Al-qisṭh</i>).....	44
BAB III PENGUATAN PRINSIP <i>EQUALITY OF OPPORTUNITY</i> DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XXII/2024.....	47
A. Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 sebagai Koreksi Yuridis terhadap <i>Presidential Threshold</i>	47
B. Penguatan Prinsip <i>Equity of Opportunity</i> Pasca Penghapusan <i>Presidential Threshold</i>	52
BAB IV PRINSIP <i>AL-‘ADL</i> DALAM <i>FIQH SIYĀSAH</i> ANALISIS PENGHAPUSAN <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i> PASCA PUTUSAN MK NOMOR 62/PUU-XXII/2024	65
A. Pandangan Prinsip <i>Al-‘Adl</i> terhadap Penghapusan <i>Presidential Threshold</i>	65
B. Bentuk Ketidakadilan dalam <i>Presidential Threshold</i> (Analisis <i>Al-‘Adl</i>) ..	71
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

i. Buku

- Badan Pengkajian MPR RI. *Penataan Sistem Presidensial*. Cet. 1. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2019.
- Ball, Alan R., dan B. Guy Peters. *Modern Politics and Government*. London: Macmillan Press Ltd, 2002.
- Darlina, Hamzah Arhan, Sapriadi, dan Eril. *Fiqh Siyasah (Hukum Politik Islam)*. Jakarta: Ganesha Kreasi Semesta, 2026.
- Hamzani, Achmad Irwan, dan Havis Aravik. *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*. Edisi Pertama. Srandakan, Bantul, Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Harisudin, Noor Novianti, Cola Ely, dan Mustajib. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi Pertama. Malang: PT. Bumi Puthuk Shankara, 2024. Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Banguntapan Bantul: Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Mariana, Dede, Neneng Yani Yuningsih, dan Caroline Paskarina. *Perbandingan Pemerintahan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015. Muchariman, Randi, Dan Helmi Al Djufri. *Siyasah Kebangsaan*. Purwokerto: Omera Pustaka, 2016.
- Strong, C. F. *A History of Modern Political Constitutions*. New York: G. P. Putnam's Sons, 1963.
- Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Supriatna, Dadang, Udaya Madjid, dan Ismail. *Sistem Pemerintahan Indonesia. Pertama*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2025.

ii. Jurnal

- Arisman, dan Lukmanul Hakim. "Pemikiran Sosiologi Politik Islam 'Abdul Wahhab Khallaf.'" *An-Nida'* 45, no. 1 (2021): 1–21.
- Asidiq, Bagus Abdulloh, dan Hani Irhamdessetya. "Analisis Teori Keadilan Mengenai Pencabutan Presidential Threshold di Indonesia." *Rampai Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2024): 130–134.
- Laming, Muhammad Tahir. "Keadilan dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradigma tentang Keadilan." *Meraja Journal* 4, no. 2 (2021): 269–278.

- Masniah Ahmad, "Tantangan Pemantau Pemilu Dalam Menjaga Hak Pilih Tahun 2024", *IJPA - The Indonesian Journal Of Public Administration* 10 (2024), 38-44.
- Moehamad Abdul Aziz, Didi Sumardi, dan Yayan Muhammad Royani, "Analisis Restorative Justice dalam Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Blb Perspektif Hukum Pidana Islam," *Journal of Indonesian Health and Human Policy* 6, no. 4 (2025): 2990–3006.
- Muhajirin, dan May Dedu. "Mashlahah Mursalah dan Implementasinya dalam Akad Muamalah." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 9 (2021): 172–200.
- Muhyidin, Syaiful. "Konsep Keadilan Dalam Alquran." *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan* 11, No. 1 (2019): 90–108.
- Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, dan Muhammad Siddiq Armia. "Analisis Siyāsah Qaḍhā'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi." *JAPHTN-HAN* 2, No. 1 (Januari 2023): 37–62.
- Mulyono, Ferio Ivan, Margaretha Anggraeni Raja Seda, dan Amira Wahyudi. Menilik Celah Plutokrasi Melalui Politik Transaksional Dalam Praktik Perdagangan Pengaruh Pasca Pemilu. *Masyarakat Indonesia*, 50(1), 29–44.
- Muthalib, Salman Abdul, dan Muhammad Faizur Ridha Bin Mohd Pauzi. "Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an." *Tafse: Journal Of Qur'anic Studies* 4 (Desember 201 AD): 150–66.
- Mutiara, Halim Talil, Dan Asni. Al-'Adl And Al-Qisṭh In Indonesian Court Rulings: A Historical Juridical Study Of National Islamic Law. 6, No. 1 (2026): 1–13.
- Nugraha, Iman, Lili Riyanti As, Osner Johnson Sianipar, dan M. Andi Asrun. "Implikasi Hukum Penghapusan Presidential Threshold 20% Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Oleh Mahkamah Konstitusi.", *Pakuan Justice Journal Of Law (PAJOUL)* 6, (2025), 2-25.
- Nur Alfi Rahmayanti dan Ikhsan Fatah Yasin. "Implikasi Putusan MK No 62 Tahun 2024 Terkait Penghapusan Presidential Threshold." *Tarunalaw: Journal Of Law and Syariah* 3, No. 02 (Juli 2025): 179–85.
- Nurjamillah, Imas, Siti Ngainnur Rohmah, dan Munawir Sajali. "Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Dan Fiqih Siyasah." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, No. 4 (Agustus 2023): 1191–208.
- Nurkhaerani, Ema. "Problematisasi Presidential Threshold Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah." *PEPAKEM: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 2, No. 1 (2024).1-15.

- Pradana, Glinggang Hima. "Menguji Normatifisasi Prinsip Kesempatan Yang Sama Sebagai Jaminan Terhadap Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Terkait. 7 (2019)". *Padjadjaran Law Review* 7, No. 2 (2019): 15-25
- Pratama, Aditya Andela, Kholifatul Muna, Zico Junius Fernando, dan Ariesta Wibisono Anditya. "Revitalisasi Konstitusional Berbasis Pancasila Dalam Penghapusan Presidential Threshold." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 5, No. 1 (April 2025): 73–88.
- Putri, Adinda Dwi, Fitria Nurkarimah, Anisa Rahmi, dan Wismanto Wismanto. "Fiqh Siyasah Dalam Pembelajaran Islam." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, No. 1 (Januari 2024): 218–30.
- Rosyidi, Muhammad. "Penerapan Fiqh Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia". 4, No. 1 (2024). *Awig Awig*, 4(1), 65-76.
- Rozaq, Abd. "Studi Komparatif Lafad Al-Adlu dan Al-Qisthu Dalam Perspektif Al-Qur'an." *SAKINA: Journal Of Family Studies* 3, No. 4 (2019): 1–14.
- Salman, Dr. Radian, dan Rosa Ristawati. "Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 1(1), 1045-1074. (2023).
- Salsabila, Saila, dan Rahmat Sholihin. "The Implementation Of Al-'Adl Method According To Muhammad Yusuf Al-Qaradhawi In The Context Of Contemporary Islamic Family Law.", *Journal Of Islamic and Law Studies* 9, (2025), 118-127
- Sari, Umi Rahayu, Kurniati, dan Musykifah Ilyas. "Titik Temu Islam dan Demokrasi:Telaah Konseptual Tentang Keadilan Dan Musyawarah." *Indonesia Of Journal Business Law* 5 (2026).75-85.
- Setiawan, Novan Dwiky. "Permasalahan Presidential Threshold: Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, No. 6 (2025): 4832–40.
- Siboy, Ahmad dan Sholahuddin Al-Fatih. "Indonesian Presidential Election On Presidential Threshold Policy: Evidence From Various Countries." *Journal Of Human Rights, Culture And Legal System* 5, No. 3 (Desember 2025): 949–81.
- Sitanggang, Celine Endang Patricia. "Mekanisme Presidential Threshold Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia". *Proceeding Legal Symposium* 2, (2024), 30-50.

- Suharti. "Al-Siyasah Al-Syar'iyyah 'Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)." *Al-Ittihad Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 2 (2015): 24–43.
- Sunaryo. "Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls: Kritik Pendekatan Komparatif atas Pendekatan Institusionalisme." *Respons: Jurnal Etika Sosial* 23, no. 1 (2018): 11–38.
- Syahrir, Pratiwi Syahyani, dan Darussalam Syamsuddin. "Konsep Siyasah Al-Maliyahpada Masa Khalifah Umar Bin Khathab dan Khalifah Utsman Bin Affan." *Siyasatuna* 2 (Mei 2021): 428–41.
- Tafdilaa, Atika, dan Emi Setyaningsih. "Analisis Konsep Keadilan Dalam Filsafat Politik Islam." *Jurnal Media Akademik* 3 (2025). 2-8
- Vendabi, Venu. "Penerapan Ambang Batas Presidensile (Presidential Threshold) Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.52/PUU-XV/2017)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta), 2019.
- Wibisono, Yusuf. "Anomali Praktik Sistem Pemerintahan Presidensial dan Multipartai Di Awal Pemerintahan Jokowi Tahun 2014." *Jurnal Ilmu dan Budaya* 40 (2017).
- Wicaksono, Dian Agung. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Fair Equality Of Opportunity Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 117/Puu-Vii/2009)." *Jurnal Konstitusi* 9, No. 1 (Mei 2016): 83.
- Wiyanto, Andy. Kekuasaan Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. *Negara Hukum : Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 6, No. 2 (2015).131-148.
- Wulandari, Ginayah, Achmad Abu Bakar, dan Andi Tenripadang. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penghapusan Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilu Indonesia Berdasarkan Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 Perspektif Siyasah Syariah. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2),(2026) 2252–2257.
- Yamani, Akhmad Zaki. "Politik Islam Dan Demokrasi Elektoral: Studi Fikih Siyasah Di Negara Mayoritas Muslim." *An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 4(1) (2025): 20–39.
- Yasin, Ikhsan Fatah. "Keadilan Substantif Dalam Ultra Petita Putusan Mahkamah Konstitusi". *Justicia Islamica* 15(1) (2018). 13-26
- Yusrizal, Navis, dan Ririn Nuraini. "Analyzing The Elimination Of The Presidential Threshold Through The Framework Of Fiqh Siyasah." *Hukum Islam* 25 (Juni 2025).103-116

iii. Peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

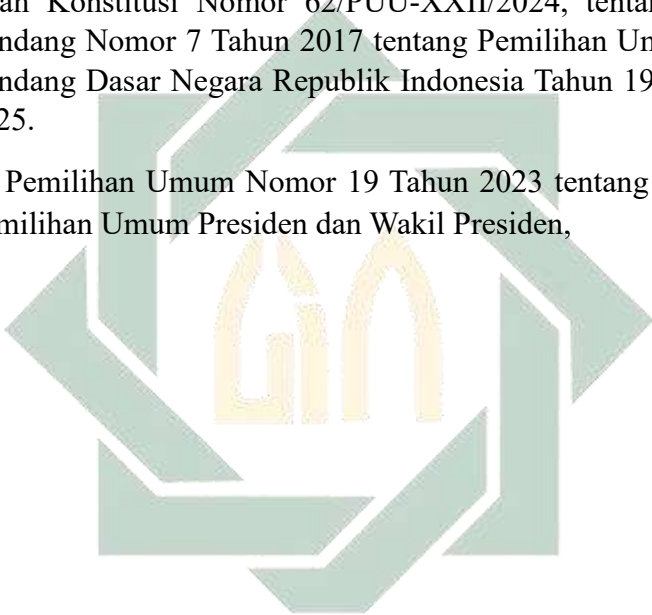
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi

Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 2 Januari 2025.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A